

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia. Berdasarkan data peta mangrove Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021) Indonesia memiliki hutan mangrove seluas 3.364.076 ha yang didominasi hutan mangrove dengan tutupan tajuk lebat sebesar 93%. Provinsi Jawa Barat memiliki hutan mangrove yang tersebar di daerah pesisir utara dan daerah pesisir selatan. Salah satu contoh hutan mangrove yang berada di daerah pesisir utara terletak di Kabupaten Cirebon. Hutan mangrove di daerah tersebut memiliki luas wilayah yang paling kecil apabila dibandingkan dengan luasan hutan mangrove lainnya yang berada di Jawa barat. Menurut data Dinas Kehutanan Jawa Barat (2019) luas hutan mangrove di Kabupaten Cirebon hanya sebesar 1.780,00 ha. Jumlah tersebut sangat kecil apabila dibandingkan dengan luasan di daerah lainnya yang berada di pesisir utara seperti Kabupaten Indramayu seluas 12.118,55 ha, Kabupaten Subang seluas 7.346,00 ha, Kabupaten Karawang 13.381,39 ha, dan Kabupaten Bekasi seluas 10.281,15 ha.

Ekosistem mangrove memiliki peran penting baik secara ekologi maupun ekonomi pada masyarakat. Oleh karena itu ekosistem mangrove ini dinilai sangat penting keberadaan di suatu wilayah pesisir. Keberadaan mangrove memiliki peran sebagai penyerap *blue carbon*, pelindung pantai, dan habitat bagi beberapa spesies (Miteva *et al.* 2015). Mangrove merupakan aset untuk menjaga kestabilan garis pantai serta mengurangi dampak yang dihasilkan dari peristiwa tsunami, abrasi, serta gelombang tinggi sehingga keberadaannya menjadi pelindung bagi kawasan pesisir (Harihar dan Verhagen, 2017). Kawasan pesisir memiliki ekosistem unik serta kaya akan sumberdaya hayati dan non hayati, namun disisi lain dampak yang ditimbulkan dari aktivitas manusia mengakibatkan wilayah ini rentan terhadap perubahan lingkungan (Wahyuningsih dan Fatimatuzzahroh, 2019). Beberapa contoh dari aktivitas manusia seperti pemukiman, pertanian, dan industri telah menyebabkan kerusakan serius terhadap wilayah pesisir seperti pencemaran lingkungan, intrusi air laut, erosi dan sedimentasi.

Permasalahan terbesar yang terjadi di kawasan pesisir adalah degradasi dan kerusakan hutan mangrove yang disebabkan karena konversi hutan menjadi pemukiman serta lahan tambak. Hutan mangrove di Indonesia telah dieksploitasi secara sistematis untuk pengembangan budidaya tambak dan penebangan kayu sejak tahun 1.800 (Ilman *et al.*, 2016). Pada tahun 1960-an diperkirakan 50% hutan mangrove Indonesia hilang terutama di wilayah Jawa dan Sumatera dan jumlahnya terus bertambah didorong oleh kebijakan terkait perluasan tambak dalam skala besar. Pesisir Kabupaten Cirebon merupakan salah satu wilayah hutan mangrove yang mengalami deforestasi. Kabupaten Cirebon tercatat memiliki wilayah hutan mangrove yang termasuk dalam delapan kecamatan dan enam diantaranya telah mengalami kerusakan mencapai 75% (Raharjo *et al.*, 2015).

Konsep ekowisata yang meliputi tiga unsur keberlanjutan yaitu aspek sosial, ekologi dan ekonomi dalam implementasinya merupakan salah satu bentuk upaya konservasi ekosistem dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumberdaya mangrove yang dimanfaatkan sebagai ekowisata dapat dijalankan dengan mengedepankan keseimbangan antara fungsi ekologis dan fungsi ekonomi ekosistem mangrove.

Pendekatan pengelolaan mangrove dalam ekowisata mangrove dengan berbasis sistem sosial ekologi menjadi penting. Pendekatan pengelolaan mangrove dengan berbasis sistem sosial ekologi mengakui pentingnya memahami interaksi kompleks antara manusia dengan lingkungan serta memperhitungkan aspek sosial, ekonomi, serta budaya dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam. Pendekatan sistem sosial ekologi menitikberatkan pada pentingnya memahami hubungan kompleks antara manusia dengan lingkungan dalam aspek pengelolaan sumberdaya alam. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan maka pengelolaan ekosistem mangrove diharapkan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta memetakan komponen sistem sosial-ekologi, dan menganalisis faktor – faktor yang mendukung terkait pengelolaan ekowisata mangrove di Pangarengan, Cirebon, Jawa Barat.

B. Identifikasi Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah

1. Kerusakan pada hutan mangrove dapat mengancam keberlangsungan hidup berbagai spesies hayati yang berada di wilayah tersebut.
2. Ketergantungan masyarakat lokal terhadap sumberdaya yang dihasilkan dari ekosistem mangrove sehingga keberlanjutan ekologi mangrove berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat setempat.
3. Pemanfaatan sumberdaya mangrove yang belum terkontrol sehingga dapat mempengaruhi keberlanjutannya.
4. Pengelolaan ekosistem mangrove sebagai ekowisata belum berjalan dengan baik sehingga diperlukan analisis untuk mengetahui faktor pendukungnya.

C. Batasan Masalah

1. Memfokuskan pada pengambilan data kondisi ekosistem mangrove melalui studi literatur atau data milik instansi.
2. Mengutamakan pengambilan data untuk memetakan sistem sosial ekologi mangrove.
3. Pengambilan data untuk mengetahui faktor – faktor pendukung pengelolaan kawasan ekowisata mangrove.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana telah diuraikan, dapat dirumuskan melalui poin rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan sistem sosial ekologi mangrove yang terjadi pada kawasan tersebut?
2. Apa saja faktor – faktor pendukung pengelolaan kawasan ekowisata di wilayah tersebut?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi serta memetakan komponen sistem sosial ekologi
2. Mengetahui faktor – faktor pendukung pengelolaan kawasan ekowisata mangrove di wilayah pesisir Desa Pengarengan, Kabupaten Cirebon

F. Manfaat Penelitian

1. Mengetahui komponen sosial-ekologi serta hubungan antar komponen
2. Memberikan pengetahuan terkait faktor pendukung kegiatan ekowisata mangrove di Desa Pengarengan.